



## POTENSI KONFLIK DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Deri Ciciria<sup>a, 1\*</sup>, Ketut Akeh<sup>a, 2\*</sup> dan Magrilisa<sup>a, 3\*</sup>

<sup>a</sup> STKIP PGRI Bandar Lampung, Pendidikan Sejarah, Bandar Lampung, Indonesia

---

### Informasi artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 15 April 2022

Revisi : 28 Mei 2022

Dipublikasikan : 30 Juni 2022

---

### Kata kunci:

Konflik,

Ekonomi,

Agama,

Sosial-Budaya

---

### ABSTRAK

*Masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki keanekaragaman suku dan agama yang juga sangat dipengaruhi daerah disekitarnya. Setiap suku yang berada di kabupaten ini berjejaring sosial dan terkoneksi secara primordial dengan suku di wilayah lain khususnya yang wilayah perbatasan kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi konflik di kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode telaah informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi serta ditunjang dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan sampel terdiri dari 8 Kampung/Tiyuh. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa potensi konflik di kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi: 1) potensi konflik berdasar atas kegiatan ekonomi, dimana pengelolaan lahan HTI yang melibatkan masyarakat antar suku telah memicu tumpang tindih pengelolaan sehingga berpotensi menimbulkan konflik berbasis SARA. 2) potensi konflik berdasar agama dan sosial budaya, fenomena ini seperti gunung es dimana mayoritas agama yang di anut masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Muslim, namun masyarakat yang beragama lain memiliki basis di sekitar wilayah perbatasan kabupaten. Perbedaan agama mengakibatkan perbedaan tuntunan teknis dalam kehidupan masyarakat yang sangat rentan terhadap potensi konflik. Perbedaan adat dan budaya antar suku dalam masyarakat juga mengakibatkan perbedaan pola dan aturan kehidupan, sehingga memicu terjadinya berbagai macam persinggungan. Pendidikan di masyarakat menjadi jalur penting dalam meresolusi konflik,*

---

*karena hanya melalui pendidikanlah keterbukaan pemikiran dibangun sehingga membuka cakrawala toleransi dalam keberagaman.*

---

**Keywords:**

*Conflict  
Economic  
Religion  
Socio-cultural*

**ABSTRACT**

*The people of Tulang Bawang Barat district have a diversity of ethnicities and religions which are also strongly influenced by the surrounding area. Every tribe in this district has a social network and is primordially connected with tribes in other areas, especially those in the border area of Tulang Bawang district. This study aims to determine the potential for conflict in the district of Tulang Bawang Barat. This research was conducted using a qualitative descriptive approach by using the method of analyzing information through interviews, direct observation and documentation and supported by a literature study. The data analysis technique in this study uses the Analysis Interactive Model from Miles and Huberman. The population in this study was the entire community of Tulang Bawang Barat district, while the sample consisted of 8 villages/Tiyuh. Based on the results of the study, it can be concluded that potential conflicts in Tulang Bawang Barat district include: 1) potential conflicts based on economic activities, where HTI land management involving inter-ethnic communities has triggered overlapping management so that it has the potential to cause SARA-based conflicts. 2) the potential for conflict based on religion and socio-culture, this phenomenon is like an iceberg where the majority of religions adhered to by the people of Tulang Bawang Barat district are Muslims, but people of other religions have bases around the district's border areas. Religious differences result in differences in technical guidance in people's lives which are very vulnerable to potential conflicts. Differences in customs and culture between tribes in society also result in differences in patterns and rules of life, thus triggering various kinds of contact. Education in the community is an important path in resolving conflict, because only through education can open-mindedness be built so that it opens the horizon of tolerance in diversity*

---

*Copyright © 2022 (Deri Ciciria, dkk.) All Right Reserved*

**Pendahuluan**

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman masyarakat. Keanekaragaman tersebut dapat dipahami melalui dua sudut pandang. Pertama, keanekaragaman secara vertikal yang ditandai dengan adanya stratifikasi sosial di masyarakat, hal ini biasanya berindikator pada status sosial, kekayaan, dan lain-lain. Kedua, keanekaragaman masyarakat yang dipandang secara horizontal yang ditandai oleh kenyataan

adanya kesatuan sosial yang sederajat satu sama lain, hal ini biasanya di lihat berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, agama, dan ras (SARA). Beranekaragam suku bangsa, agama, dan ras di provinsi Lampung tentu saja juga membawa perbedaan cara-cara hidup atau kebudayaan yang ada di dalamnya. Hal tersebut mencerminkan differensiasi antar suku bangsa tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat. Keanekaragaman masyarakat di Lampung terutama disebabkan oleh program kolonisasi yang telah dilakukan pemerintah Hindia Belanda sejak 1905, dan setelah Indonesia merdeka dilanjutkan melalui program transmigrasi sampai tahun 1989 (Ciciria, Ferliana, & Hamer, 2021).

Keanekaragaman tersebut pada satu sisi membawa dampak positif dengan terjadinya asimilasi dan akulturasi budaya. Interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila terdapat suasana saling mempercayai, menghargai, dan saling mendukung. Terjadinya kontak sosial dimana secara fisik subjek yang akan berinteraksi bertemu merupakan wujud dari rasa kepercayaan dan menghargai. Kemudian munculnya komunikasi dalam kontak sosial tersebut juga merupakan wujud dari rasa saling menghargai dan mendukung. Interaksi sosial bersifat dinamis yang menyesuaikan dengan kebutuhan subjek manusianya (Desike, Audia, & Wardani, 2021).

Alur terjadinya interaksi sosial adalah dimulai dengan kerja sama (*cooperation*) untuk dapat saling memenuhi kebutuhan kemudian antar individu saling berlomba untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga terciptalah persaingan (*competition*), apabila persaingan yang terjadi tidak sehat dan saling menjatuhkan satu sama lain apalagi sampai terjadi kontak fisik maka itu telah sampai pada tahap pertikaian (*conflict*), dan yang terakhir adalah proses meredam konflik yang disebut dengan akomodasi (*accommodation*). Siklus ini akan terus kembali berulang walaupun dalam jangka waktu yang relative lama (Wulansari & Gunarsa, 2013). Namun di sisi lain hal tersebut membawa dampak negative dengan munculnya berbagai konflik yang berlatar kesukuan dan keagamaan (Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, Cicilia, & Metro, 2017).

Karakteristik yang menjadi sifat dasar keanekaragaman masyarakat (majemuk), yaitu sebagai berikut :

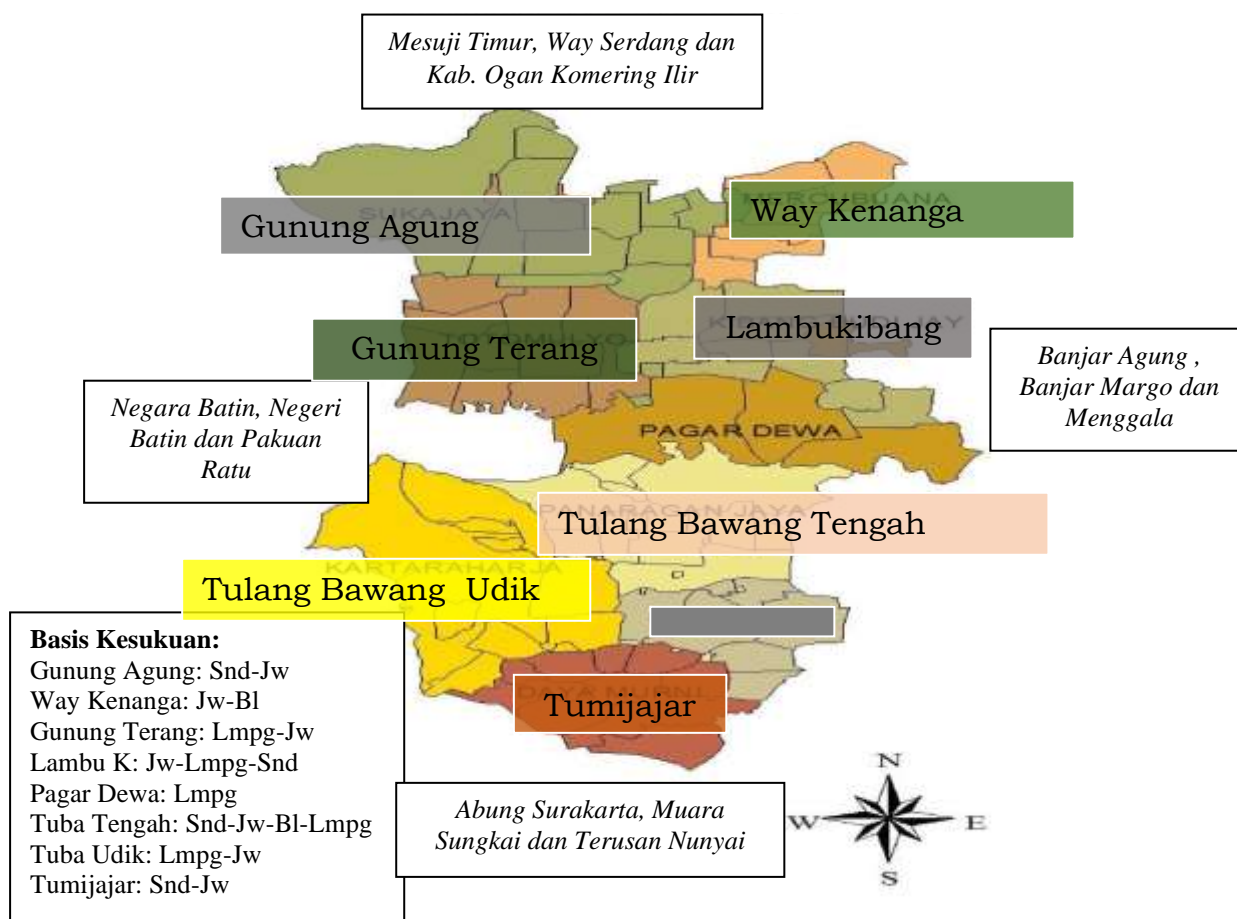
- a. Terjadinya segmentasi golongan, dimana setiap golongan memiliki tata adat dan budaya yang berbeda satu sama lain.
  - b. Memiliki struktur sosial yang berdiri sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain
  - c. Tidak mencari pembenaran atas adat dan budayanya sehingga bersifat toleran satu dengan yang lain.
  - d. Walaupun kecil, konflik sering terjadi sebagai akibat persinggungan kepentingan
  - e. Perlu adanya paksaan untuk mewujudkan integrasi
  - f. Biasanya terjadi saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi
  - g. Kelompok atau golongan yang memiliki basis massa paling besar cenderung mendominasi kelompok-kelompok yang lain
- (Tubagus Ali Rahman Puja Kesuma, 2017)

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu gambaran wilayah dengan masyarakat yang majemuk di provinsi Lampung, karena terdiri dari berbagai komunitas/golongan suku dan agama. Hal ini disebabkan karena kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) pecahan dari kabupaten Tulang Bawang. Menurut Sabarrudin, dahulu wilayah ini merupakan daerah tujuan transmigrasi pada masa pemerintahan

orde baru tepatnya pada program pembangunan lima tahun (Pelita) II yang dimulai tahun 1974/1975 hingga Pelita IV pada tahun 1984/1985 yang saat itu kabupaten Tulang Bawang masih menjadi bagian dari kabupaten Lampung Utara.

Para transmigran mayoritas berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY Yogyakarta, dan Bali yang datang dengan sistem trans umum, trans swakarsa (pola daerah, monitoring dan pendataan), trans ABRI, dan transos (Sa, 2013). Letaknya yang strategis dengan dilintasinya jalur lintas timur sumatera dan saat ini menjadi bagian dari proyek pembangunan jalan tol trans-sumatera (JTTS) membuat wilayah ini berkembang dengan pesat. Hal ini ditunjang tanah yang subur untuk perkebunan dan pertanian sekaligus serta adanya sungai-sungai besar yang cocok untuk budidaya perikanan air tawar sekaligus menjamin pasokan air untuk keperluan bercocok tanam.

Masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki keanekaragaman suku dan agama yang juga sangat dipengaruhi daerah disekitarnya. Setiap suku yang berada di kabupaten ini berjejaring sosial dan terkoneksi secara primordial dengan suku di wilayah lain khususnya yang wilayah perbatasan kabupaten Tulang Bawang. Untuk lebih jelasnya, pemetaan keberagaman suku di kabupaten Tulang Bawang Barat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Pemetaan wilayah kesukuan kabupaten Tulang Bawang Barat

Gambar tersebut menjelaskan bahwa kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki masyarakat majemuk yang terdiri dari masyarakat pribumi Lampung dan pendatang (Jawa,

Sunda, dan Bali). Oleh karena itu, kehidupan bermasyarakat di kabupaten Tulang Bawang Barat tidak terelakkan terjadinya interaksi antar suku. Keberadaan suku Jawa menyebar dan menjadi mayoritas di wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat dan sekitarnya. Suku Lampung memiliki basis masyarakat di kecamatan Mesuji Timur dan Way Serdang (kabupaten Mesuji), kecamatan Negara Batin, Negeri Batin, Pakuan Ratu (kabupaten Way Kanan) dan kecamatan Banjar Agung (kabupaten Tulang Bawang) sebagai bagian dari kesatuan adat Megow Pak Tulang Bawang. serta suku Bali memiliki basis masyarakat di kecamatan Simpang Pematang hingga Brabasan (kabupaten Mesuji) dan wilayah Unit II hingga Ceper kecamatan Banjar Agung (kabupaten Tulang Bawang).

Berdasarkan pemetaan keberagaman suku dan agama tersebut, kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi kerawanan konflik yang dapat meluas pada unsur suku, agama dan ras (RAS). Intensnya interaksi sosial juga dapat memicu rawannya kecemburuan dan prasangka sosial yang dapat menjurus pada persinggungan kepentingan antar suku dan agama. Jawa memang suku mayoritas penduduk, namun bukan berarti dapat mendominasi peranannya karena suku Lampung yang berada di kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki basis kesukuan di kecamatan Mesuji Timur dan Way Serdang (kabupaten Mesuji), kecamatan Negara Batin, Negeri Batin, Pakuan Ratu (kabupaten Way Kanan) dan kecamatan Banjar Agung (kabupaten Tulang Bawang) sebagai bagian dari kesatuan adat Megow Pak Tulang Bawang yang secara administratif sangat dekat dan berbatasan langsung dengan kabupaten Tulang Bawang Barat.

Begitu juga dengan suku Bali yang memiliki basis kesukuan di kecamatan Simpang Pematang hingga Brabasan (kabupaten Mesuji) dan wilayah Unit II hingga Ceper kecamatan Banjar Agung (kabupaten Tulang Bawang) serta kecamatan Seputih Raman dan Seputih Banyak (kabupaten Lampung Tengah) yang secara administratif juga sangat dekat dan berbatasan langsung dengan kabupaten Tulang Bawang Barat. Islam juga merupakan agama mayoritas di Tulang Bawang Barat, namun peranannya juga di dampingi oleh Hindu, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa saja menjadi "titik api". jika memang konflik antar suku dan agama terjadi, karena Kabupaten ini merupakan salah satu titik temu wilayah dengan berbagai kepentingan di provinsi Lampung (kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Way Kanan).

Saat ini kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam wilayah yang kondusif dengan kehidupan masyarakat yang harmonis bila di bandingkan wilayah lainnya di kabupaten sekitarnya yang memiliki keberagaman penduduk. Namun peneliti mendeteksi fenomena krakatoa di wilayah ini, dimana keharmonisan kehidupan bermasyarakat hanya nampak di permukaan saja namun didalam kehidupan yang sebenarnya nuansa prasangka dan kecemburuan sosial bergeliat di masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik pada pemetaan potensi konflik di kabupaten Tulang Bawang Barat. Diketuinya zona konflik dapat memberikan sumber informasi berdasarkan kajian ilmiah yang relevan untuk menciptakan suatu pencegahan dan penanganan konflik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pola ini juga sangat berguna sebagai master plan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam pengkajian pola pembangunan dari sisi sosial budaya masyarakatnya.

## Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menggali suatu permasalahan secara alami dan mendalam dengan menggunakan metode telaah informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi serta ditunjang dengan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada aparatur pemerintahan, pemuka/ tokoh masyarakat, dan masyarakat yang menjadi praktisi kegiatan sosial ekonomi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat independen dan alamiah, yang berarti bahwa hasilnya tidak bersifat subjektif, tidak bisa direayasa dan sesuai dengan yang sebenarnya. Sedangkan dokumentasi dilakukan terhadap berbagai informasi yang diperoleh saat peneliti terlibat di lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman (Huberman & Miles, 2002), dengan triangulasi sumber dan teknik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan sampel terdiri dari 8 Kampung/ Tiyuh.

Populasi berdasarkan data dari BPS tahun 2014 yang berjumlah 264.712 jiwa . Subjek penelitian atau informan ditentukan secara terpilih dan dengan teknik snowball sampling. Informan yang memiliki pemahaman tentang masalah dalam penelitian ini dipilih langsung oleh peneliti, dan untuk beberapa kajian materi yang lain yang informan tidak pahami, maka akan dirujuk pada informan lain yang lebih berkompeten. Mengacu pada fokus masalah dan tujuan penelitian, maka yang akan dijadikan subjek penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap paham dan mengerti tentang materi yang akan dikaji yaitu: (1) aparatur pemerintahan, (2) tokoh masyarakat (Suku Jawa, Lampung, Bali, dan Sunda), dan (3) masyarakat yang menjadi praktisi kegiatan sosial ekonomi.

## Hasil dan pembahasan

Integrasi dan konflik merupakan dua proses yang saling bertentangan namun sangat erat kaitannya satu sama lain, integrasi merujuk pada arah persatuan sedangkan sebaliknya konflik merujuk pada arah perpecahan. Integrasi terjadi bila interaksi sosial dimasyarakat menjelma menjadi suatu pola ketergantungan antar kelompok/ golongan dalam masyarakat, Sebagai contoh dalam bidang ekonomi, apabila semakin kecil ketergantungan ekonomi antar kelompok masyarakat, maka akan semakin besar potensi konflik yang terjadi (Ciciria et al., 2021). Menurut Wirawan selain bidang ekonomi masih banyak lagi bidang kehidupan yang dapat menjadi indikator terciptanya integrasi atau konflik antara lain perbedaan suku, ras, kelas/ kelompok sosial, kehidupan politik dan perbedaan agama (Wirawan, 2009).

Potensi konflik bisa terjadi karena terjadinya pertentangan dan persinggungan pihak-pihak yang berkepentingan. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas (Sudarmanto et al., 2021). Dalam berbagai kasus konflik SARA khususnya di provinsi Lampung, sering kali ditekankan bahwa penyebab pertentangan dan persinggungan itu dikarenakan perbedaan tingkatan ekonomi, pola pikir dan pola perilaku. Hal ini diperkuat pendapat setiadi, dkk bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akhirnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk

ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status *quo* dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status *need* (Setiadi & Kolip, 2011). Secara sederhana penyebab konflik dibagi tiga, yaitu: Pertama, perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasakan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial (Narwoko & Suyanto, 2004).

Kedua, perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik (Triantoro, 2019). Ketiga, perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana (Susanto, 1983).

### **Potensi Konflik Berdasar Kegiatan Ekonomi**

kabupaten Tulang Bawang Barat juga menjadi merupakan pusat perekonomian bahkan hingga masyarakat dari kabupaten sekitarnya. Hal ini ditandai dengan adanya PT Huma Mekar Indah (HIM) yang menjadi tempat pembelian sadapan karet petani. Selain itu, adanya hutan tanam industri (HTI) di kabupaten Tulang Bawang Barat membuat masyarakat berbondong-bondong mengadu nasib dengan menyewa lahan dan bercocok tanam industri seperti karet dan singkong walaupun kawasan tersebut merupakan milik negara yang tidak bisa diperjual-belikan secara resmi. Keadaan ini menyebabkan banyak masyarakat dari kabupaten sekitarnya yang menggantungkan kehidupannya dengan menggarap lahan dan atau bekerja di wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat. Hal ini memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat dilihat dari berkembangnya beberapa pasar tradisional menjadi semi modern, munculnya berbagai bentuk lembaga keuangan konvensional dan syariah ataupun koperasi (seperti berbagai bentuk koperasi simpan pinjam dan arisan). namun disisi lain wilayah ini sangat potensial memicu konflik karena HTI dianggap masyarakat sebagai tanah yang tak bertuan, sehingga memicu dualisme kepemilikan yang dapat meluas karena melibatkan kelompok tani yang bersangkutan.

Kehidupan antar suku berjalan dengan kondusif, dengan semakin meningkatnya rasa saling ketergantungan antar suku terutama dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat nyata salah satunya pada interaksi di pasar Mulya Asri, Pulung Kencana dan Daya Murni, tidak ada kecemburuan sosial yang nampak dari kegiatan ekonomi antara suku pribumi dan pendatang walaupun memiliki bidang usaha yang sama. Dalam proses ini setiap individu atau kelompok masyarakat akan terkodefikasi tentang keahlian pemenuhan kebutuhannya

masing-masing yang dijadikan nilai jual terhadap pemenuhan kebutuhannya yang lain. Pemenuhan kebutuhan antar masyarakat yang memiliki kodifikasi keahliannya tersebut secara alami akan membentuk suatu pola interdependensi sosial yang dapat memicu terjadinya konflik dan atau integrasi. Pada konsep ini terjadi *sequential interdependence* yaitu suatu bentuk ketergantungan yang setara dan saling melengkapi dan mengisi antara satu dengan yang lain, namun tidak bisa dipertukarkan. (Wirawan, 2009).

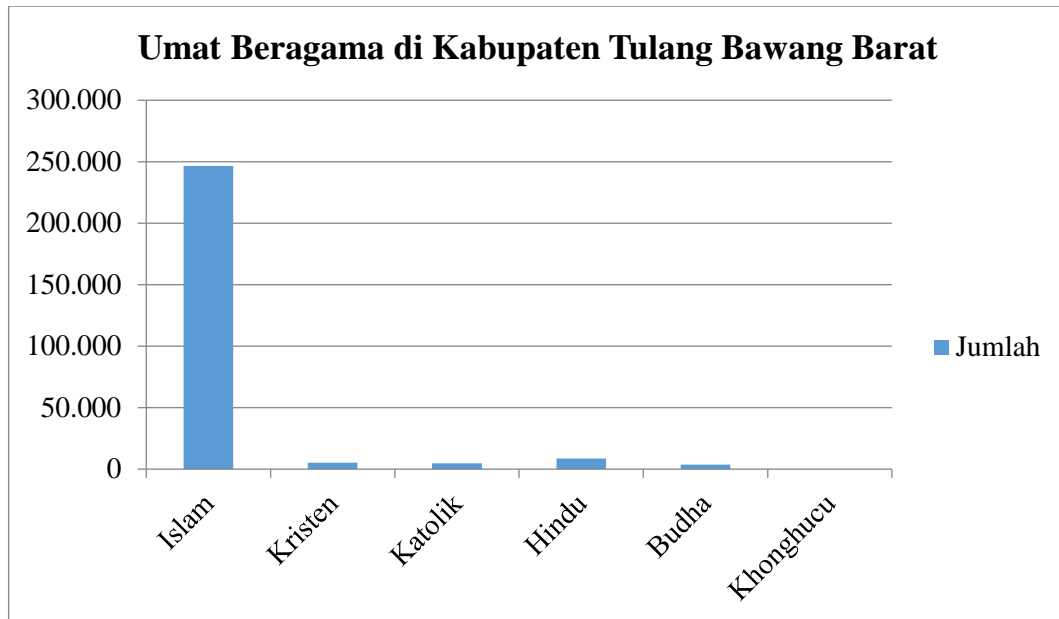
Hubungan ketenagakerjaan dalam perusahaan/ pabrik/ home industry/ pengolahan pertanian/ perkebunan berjalan dengan seimbang dengan persaingan terbuka karena tidak ada intimidasi suatu golongan/ kelompok dalam menjalankan usahanya, pekerja dan pemilik usaha walaupun berbeda suku namun memiliki komitmen dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Pada bidang politik seperti dalam halnya pemilihan kepala Kampung/ Tiyuh, masyarakat di kabupaten Tulang Bawang Barat tidak mendasarkan pada sentimen kesukuan namun lebih pada kualitas dan kemampuan para kandidatnya, siapapun orangnya dengan latar belakang suku atau agama apapun memiliki hak yang sama dalam hal ini. Pada bidang sosial, rasa saling membantu antar warga masyarakat tercermin dari kegiatan gotong royong "bersih-bersih kampung" yang biasanya dilaksanakan setiap hari jum'at, sabtu, atau minggu.

Wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat juga merupakan wilayah pintas penghubung jalur transportasi jalur lintas pantai timur (Jalinpantim) Sumatera dengan jalur lintas tengah (Jalinteng) dan jalur lintas pantai barat (Jalinpanbar). Lalu lintas transportasi jalan trans nasional tersebut menjadi salah satu faktor penting pesatnya pembangunan kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai kabupaten muda untuk bersaing dengan kabupaten sekitarnya. Kemajuan pembangunan kabupaten Tulang Bawang Barat juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dengan ditetapkannya kabupaten ini menjadi bagian dari megaproyek jalan tol trans sumatera (JTTS) yang menjadikan kabupaten ini sebagai cut lines transportasi yang hendak hijrah dari jalur JTTS atau Jalinpantim ke jalur Jalinteng atau Jalinpanbar.

### **Potensi Konflik Berdasar Agama dan Sosial Budaya**

tempat ibadah di bangun dengan megah dan saling berdampingan dengan tempat ibadah lainnya. Kondisi ini memberikan gambaran betapa kuatnya ikatan persatuan dan kesatuan yang disemboyankan "Bhineka Tunggal Ika" sebagai sebuah cerminan ideal idiologi bangsa. Toleransi kehidupan beragama tercermin dari kenyamanan pelaksanaan peribadatan masing-masing pemeluk agama dan pemanfaatan aula/ tanah lapang di lingkungan tempat ibadah untuk kegiatan-kegiatan sosial. Masyarakat pun saling bersilaturahmi dengan saling kunjung-mengunjungi antar tetangga walaupun itu berbeda suku dan agama, serta tidak menunjukkan sesuatu hal yang dilarang/ diharamkan dalam kehidupan beragama yang satu dengan yang lainnya seperti memelihara dan mengkonsumsi anjing dan babi. Dalam paguyuban masyarakat, acara kenduri juga dilaksanakan lintas agama dengan memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kehidupan beragama masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat juga tergolong sangat majemuk dengan rincian sebagai berikut:





Gambar 1.2 Jumlah umat beragama kabupaten Tulang Bawang Barat

Berdasarkan chart tersebut diketahui bahwa Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat yang mayoritas dianut masyarakat yang bersuku Lampung, Jawa dan Sunda. Sedangkan Hindu merupakan agama yang dianut oleh masyarakat suku Bali. Walaupun sama-sama muslim, namun peluang konflik antara suku Lampung, Sunda dan Jawa cukup terbuka lebar mengingat perbedaan watak/ tabiat dan adat-istiadat. Misalnya dalam adat pernikahan dengan cara larian, bagi suku Lampung hal itu sah-sah saja karena dilakukan dengan kaidah norma adat dengan tetap menjaga nilai-nilai syariat Islam, namun bagi suku Jawa dan Sunda merupakan suatu hal yang tabu dan menimbulkan persepsi negatif karena rawan dengan fitnah sosial dan agama.

Berdasarkan pemetaan keberagaman suku dan agama tersebut, kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi kerawanan konflik yang dapat meluas pada unsur suku, agama dan ras (RAS). Intensnya interaksi sosial juga dapat memicu rawannya kecemburuan dan prasangka sosial yang dapat menjurus pada persinggungan kepentingan antar suku dan agama. Jawa memang suku mayoritas, namun bukan berarti dapat mendominasi peranannya karena suku Lampung yang berada di kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki basis kesukuan di kecamatan Mesuji Timur dan Way Serdang (kabupaten Mesuji), kecamatan Negara Batin, Negeri Batin, Pakuan Ratu (kabupaten Way Kanan) dan kecamatan Banjar Agung (kabupaten Tulang Bawang) sebagai bagian dari kesatuan adat Megow Pak Tulang Bawang yang secara administratif sangat dekat dan berbatasan langsung dengan kabupaten Tulang Bawang Barat.

Begitu juga dengan suku Bali yang memiliki basis kesukuan di kecamatan Simpang Pematang hingga Brabasan (kabupaten Mesuji) dan wilayah Unit II hingga Ceper kecamatan Banjar Agung (kabupaten Tulang Bawang) serta kecamatan Seputih Raman dan Seputih Banyak (kabupaten Lampung Tengah) yang secara administratif juga sangat dekat dan berbatasan langsung dengan kabupaten Tulang Bawang Barat. Islam juga merupakan agama mayoritas, namun peranannya juga di dampingi oleh Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Budha yang memiliki basis wilayah di kabupaten di sekitarnya. Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa saja menjadi "titik api" sekaligus "medan pertempuran" jika memang konflik antar

suku dan agama terjadi, karena Kabupaten ini merupakan salah satu titik temu wilayah dengan berbagai kepentingan di provinsi Lampung (kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Way Kanan.

### Potensi Konflik Berdasar Pendidikan

Perwujudan kehidupan yang harmonis di kabupaten Tulang Bawang Barat ini belum teregenerasi melalui lingkungan pendidikan. Berikut data jumlah sekolah di kabupaten Tulang Bawang Barat

**Tabel 1. Data Satuan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat**

No	Kec	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA			SMK			Total
		N	s	jml	N	s	jml	n	s	jml	n	S	jml	
	<b>Total</b>	165	23	188	33	45	78	15	12	27	2	16	18	311
1	Kec. Tulang Bawang Udik	22	0	22	5	3	8	2	1	3	0	1	1	34
2	Kec. Tumijajar	27	3	30	4	9	13	3	3	6	0	5	5	54
3	Kec. Tulang Bawang Tengah	43	10	53	7	12	19	4	5	9	1	3	4	85
4	Kec. Lambu Kibang	14	1	15	4	2	6	2	0	2	0	1	1	24
5	Kec. Pagar Dewa	4	2	6	2	0	2	1	1	2	0	0	0	10
6	Kec. Way Kenanga	13	0	13	2	6	8	1	0	1	0	1	1	23
7	Kec. Gunung Terang	22	6	28	5	8	13	1	2	3	0	3	3	47
8	Kec. Gunung Agung	20	1	21	4	5	9	1	0	1	1	2	3	34

Sumber: <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik (Minsih, Rusnilawati, & Mujahid, 2019). Bersifat kompleks, menunjukkan bahwa sekolah sebagai suatu sistem sosial di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan bersifat unik, menunjukkan bahwa sekolah sebagai suatu organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain, seperti tempat terjadinya proses pembelajaran dan pembudayaan kehidupan manusia. Sebagai salah satu lembaga pembentukan karakter toleransi paling efektif, jumlah sekolah tersebut (khususnya tingkat menengah (SMP/ SMA sederajat) tentu belum ideal bila dibandingkan dengan daya tampung siswanya yang mencapai 11.446 siswa untuk SMP sederajat dan 3.886 siswa untuk SMA sederajat (Data jumlah siswa SMP dan SMA Sederajat di kabupaten Tulang Bawang Barat 2014/ 2015 yang diakses melalui <https://tulangbawangbaratkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/8> pada tanggal 11 Januari 2017). Apalagi bila di lihat dari standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dimana jumlah siswa SMP sederajat dalam tiap kelas berkisar 30-40 siswa (pasal 3 ayat (1) huruf h) dan 70 persen lulusannya harus melanjutkan ke jenjang menengah atas (pasal 3 ayat (1) huruf j), sedangkan untuk SMA sederajat jumlah siswa tiap kelas berkisar 30-40 siswa (pasal 4 ayat (1) huruf h) dan 25 persen lulusannya harus melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (pasal 4 ayat (1) huruf j).

Saat ini saja hanya terdapat 78 SMP Sederajat di kabupaten Tulang Bawang Barat dengan rincian 33 SMP Negeri, 20 SMP Swasta, dan 25 MTs Swasta. Sedangkan untuk tingkat SMA sederajat hanya terdapat 45 SMA sederajat dengan rincian 15 SMA negeri dan swasta, 12 MA

negeri dan swasta, dan 18 SMK negeri dan swasta. Zona pendidikan di kabupaten Tulang Bawang Barat juga hanya terfokus pada tiga kecamatan yaitu Tulang Bawang Udik, Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah. Sehingga pemerataan pendidikan sebagai sarana dan prasarana pembelajaran toleransi kurang efektif dan efisien.

Melalui lingkungan pendidikan setiap anak pasti memperoleh pengalaman hidup bertoleransi dalam keberagaman terutama dari teman sebayanya. Kehidupan antar suku dan agama di kabupaten Tulang Bawang Barat ini tentu saja belum menciptakan keadilan (*justice*) dimana antar suku akan merasa satu kesatuan yang utuh yang tentu saja tidak memihak bahkan pada golongan/ kelompoknya sendiri, kewajaran (*equity*) yang menjunjung tinggi toleransi, persamaan hak (*equality*) dimana semua orang dipandang sama tanpa memandang perbedaan SARA, dan kekuasaan (*power*) yang bertanggung jawab di masyarakat.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa potensi konflik di kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi: 1) potensi konflik berdasar atas kegiatan ekonomi, dimana pengelolaan lahan HTI yang melibatkan masyarakat antar suku telah memicu tumpang tindih pengelolaan sehingga berpotensi menimbulkan konflik berbasis SARA. 2) potensi konflik berdasar agama dan sosial budaya, fenomena ini seperti gunung es dimana mayoritas agama yang di anut masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Muslim, namun masyarakat yang beragama lain memiliki basis di sekitar wilayah perbatasan kabupaten. Perbedaan agama mengakibatkan perbedaan tuntunan teknis dalam kehidupan masyarakat yang sangat rentan terhadap potensi konflik. Perbedaan adat dan budaya antar suku dalam masyarakat juga mengakibatkan perbedaan pola dan aturan kehidupan, sehingga memicu terjadinya berbagai macam persinggungan. Pendidikan di masyarakat menjadi jalur penting dalam meresolusi konflik, karena hanya melalui pendidikanlah keterbukaan pemikiran dibangun sehingga membuka cakrawala toleransi dalam keberagaman

### **Ucapan terima kasih**

Ucapan terima peneliti haturkan kepada pihak-pihak yang berperan dalam penelitian/artikel ini. Khususnya pada STKIP PGRI Bandar Lampung yang telah memberikan dukungan finansial sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

### **Referensi**

- Ciciria, D., Ferliana, L., & Hamer, W. (2021). Analisis Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Desa Di Desa Wonosari, Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education*, 2(2), 15-27.
- Desike, V., Audia, A., & Wardani, W. (2021). Konflik Antar Masyarakat Etnis Jawa Di Desa Sukaraja Tiga Dan Masyarakat Etnis Lampung Di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur. *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education*, 2(2), 82-95.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*: Sage.

- Kesuma, T. A. R. P. (2017). Pola Integrasi dalam Masyarakat Majemuk (Studi Ketahanan Sosial di Kecamatan Kotagajah, Lampung). *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia)*, 4(2), 184-212.
- Kesuma, T. A. R. P., Cicilia, D., & Metro, I. (2017). PIIL PESENGGIRI: STRATEGY OF CONFLICT RESOLUTION THAT RAISES RELIGIOUS VALUES AND PANCASILA. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 19(2).
- Minsih, M., Rusnilawati, R., & Mujahid, I. (2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Membangun Sekolah Berkualitas Di Sekolah Dasar. *Profesi Pendidikan Dasar*, 6(1), 29-40.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2004). Sosiologi teks pengantar dan terapan. *Jakarta: Prenada Media*.
- Sa, S. (2013). Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin. *Jakarta: Buletin Way Lima Manjau*.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi dan pemecahannya*: Kencana.
- Sudarmanto, E., Sari, D. P., Tjahjana, D., Wibowo, E., Mardiana, S. S., Purba, B., . . . Manalu, N. V. (2021). *Manajemen Konflik*: Yayasan Kita Menulis.
- Susanto, A. S. (1983). *Pengantar sosiologi dan perubahan sosial*: Binacipta.
- Triantoro, D. A. (2019). Konflik sosial dalam komunitas virtual di kalangan remaja. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 135-150.
- Wirawan, W. (2009). Konflik dan manajemen konflik: Teori, aplikasi, dan penelitian. *Jakarta: PT Bumi Aksara*.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2013). *Sosiologi: Konsep dan teori*: Refika Aditama.